

BAB II

MESIR PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA FAROUK

A. Sekilas Pemerintahan Monarki Mesir

Mesir memang diperebutkan oleh berbagai negara di Eropa,¹ terkait dengan letaknya yang strategis. Negara-negara Eropa memberikan pengaruh pada Mesir, terutama pada masa penguasaan Inggris. Mesir secara resmi jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1882 dari pendudukan Turki Usmani. Pada tahun 1841-1914 wilayah Mesir memang merupakan bagian dari imperium Turki Usmani, namun banyak terjadi konflik antara Turki dengan negara Eropa (terutama Inggris). Pasca pendudukan Inggris, Mesir menjadi negara monarki konstitusional dengan penentuan kebijakan yang didominasi oleh Inggris.

Pemerintahan Monarki Mesir banyak mengambil contoh dari pemerintahan monarki konstitusional Inggris. Pemerintah Inggris memang sengaja mewujudkan adanya kesamaan dalam rangka mempermudah penguasaan di wilayah Mesir. Mesir pada masa pemerintahan Raja Fuad² memang didominasi oleh kepentingan Inggris yang sangat kentara. Meskipun sebagai negara monarki

¹ John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 234.

² Raja Fuad adalah merupakan Raja Mesir yang memerintah pada tahun 1917-1936. Masa pemerintahan Raja Fuad, sektor kehidupan di Mesir didominasi oleh pemerintahan Inggris. Meskipun Mesir diberi kemerdekaan pada tanggal 28 Februari 1922 dari Inggris, kondisi Mesir masih berada di bawah bayang-bayang penguasaan Inggris. Lihat Mohamed Moustofa Ata, Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh M. Yehia Eweis, *Egypt Between Two Revolution*. Cairo: Imprimerie Misr S.A.E, 1955, hlm. 70-71.

yang dibatasi oleh konstitusi, raja memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat. Seringkali rakyat merasa bahwa sistem pemerintahan monarki inilah sumber dari kesengsaraan dan penderitaan.

Sistem pemerintahan monarki Mesir hanya akan membuat kebencian masyarakat semakin meningkat. Pemerintahan tersebut hanya memihak pada raja, bangsawan, tuan tanah, dan kerabat-kerabat yang disenangi oleh raja.³ Kepentingan rakyat diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan raja. Selain kesengsaraan rakyat, pada awal kemerdekaan Mesir dari Inggris 1922 masih terjadi ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, sebenarnya Revolusi 1919 cukup membawa angin segar bagi Mesir.⁴

Pasca revolusi tersebut, mulai berkembang rasa nasionalisme bangsa Mesir dan intelektual generasi muda meningkat. Namun, nampaknya hal tersebut belum cukup untuk mengubah wajah Mesir dan menundukkan dominasi Inggris di Mesir. Kuatnya dominasi Inggris dan lemahnya mental pemerintah Mesir membuat situasi semakin memanas. Krisis terjadi dimana-mana dan kesenjangan antara istana dan rakyat meningkat tajam. Keadaan tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1935.

Raja Fuad memiliki ambisi keinginan untuk pemerintahan otoriter. Dia tidak pernah mengakui hak-hak rakyat, dia juga tidak ingin mewujudkan

³ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴ Gershoni Israel, dan Jankowski, James P, *Egypt, Islam, and The Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930*. Oxford: Oxford University Press, 1986, hlm. 270.

kedaulatan bahwa dalam negara berasal dari kehendak rakyat, dan bahwa Raja hak berdaulat atas nama rakyat. Absolutisme Raja Fuad yang ditandai oleh antagonisme ke arah semua pemerintah yang populer, pelanggaran berulang-ulang konstitusi, dan upaya untuk menahan kehidupan konstitusional... Ketidakstabilan dalam kehidupan politik, ketidakamanan, krisis berulang, kesenjangan yang tumbuh antara istana dan rakyat, dan perjuangan melawan dominasi asing meningkat, ditandai panggung politik di Mesir sampai 1935.⁵

Raja Fuad merupakan seorang Raja yang otoriter dalam pemerintahan sehingga tidak disenangi oleh rakyatnya. Sifat loyalnya terhadap pemerintahan Inggris membuat kebencian rakyat terhadap dirinya semakin mendalam. Raja Fuad dalam menjalankan pemerintahannya tidak didasarkan atas asas demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, pasca meninggalnya Raja Fuad dan digantikan oleh Raja Farouk seolah membawa angin segar bagi masyarakat Mesir. namun, hal tersebut tidak merubah keadaan Mesir yang tetap berada dalam lingkaran pemerintahan monarki.

B. Situasi Politik Mesir

Sekitar abad ke-20, di Mesir timbul usaha untuk mengakhiri kolonialisme Inggris di wilayah Mesir. Pemerintahan Inggris menguasai Mesir sejak tahun

⁵ Terjemahan bebas dari “King Fuad had a craving ambition for authoritarian rule. He had never recognized the rights of the people, nor did he wish to realize that sovereignty within a state derives from the will of the people, and that the King exercises sovereign rights on behalf of the people. King Fuad’s absolutism was marked time and again by his antagonism towards all popular governments, his repeated violation of the constitution, and his attempts to stifle constitutional life.... Instability in political life, intermittent waves of insecurity, recurring crises, the growing gap between the palace and the people, and the intensifying struggle against foreign domination, characterized the political scene in Egypt until 1935.” Lihat Mohamed Moustofa Ata, *op.cit.*, hlm. 70.

1882.⁶ Masyarakat Mesir memimpikan hidup bebas di negaranya tanpa ada penguasaan asing yang mendominasi. Pemerintahan Inggris menguasai Mesir dikarenakan ikut ambil bagian mengenai kepemilikan saham di Terusan Suez yang memiliki peran penting di dunia internasional. Seperti halnya di negara-negara Afrika lainnya, penjajahan atas suatu wilayah oleh negara lain selalu berdampak negatif. Masyarakat mulai jenuh dan berusaha meminta kebebasannya dari Inggris.

Adapun keinginan untuk mewujudkan Mesir menjadi sebuah negara yang merdeka dipelopori oleh Partai Wafd yang merupakan partai terbesar Mesir.⁷ Partai Wafd memiliki pengaruh paling kuat dalam pemerintahan Mesir. Pemerintah Inggris merespon keinginan Partai Wafd dengan memberikan kemerdekaan bagi Mesir yang diproklamirkan pada bulan Februari 1922. Keputusan yang diberikan Inggris kepada masyarakat Mesir ibarat memberikan harapan yang palsu. Meskipun Mesir diberi kemerdekaan, namun Inggris masih tetap mengurus hal-hal vital terkait dengan kenegaraan Mesir.

⁶ M. Hamdan Basyar, “Bagaimana Militer Menguasai Mesir”, *Jurnal Ilmu Politik* 3. Jakarta: Gramedia, 1998, hlm. 85.

⁷ Partai Wafd atau Wafdist bermula dari suatu gerakan kebangsaan yang dipimpin oleh Saad Zaglul Pasha. Nama Wafdist berasal dari kata Wafd yang artinya perutusan. Partai perutusan inilah yang terus-menerus memegang kunci gerakan politik di negara Mesir. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis cenderung memakai sebutan Partai Wafd untuk menggantikan sebutan Partai Wafdist. Lihat di Oemar Amin Hoesin, *Gelora Politik Negara-negara Arab*. Jakarta: Tintamas, 1953, hlm. 32.

Bila dilihat dari sumber daya manusianya, Mesir bukan negara terbelakang seperti halnya negara-negara di wilayah Afrika lainnya. Partai Wafd yang sejak awal dibentuk memang selalu mengupayakan kemerdekaan bagi Mesir. Selain Partai Wafd, ada pula kelompok-kelompok lain yang menginginkan kemerdekaan. Golongan bangsawan kerajaan Mesir juga menyerukan tentang kemerdekaan. Banyak kalangan yang mendengungkan kebebasan, semua mempunyai misi yang sama, yakni kemerdekaan bagi bangsa Mesir.

Berbagai perselisihan terjadi dalam tubuh pemerintahan Mesir ataupun masyarakat pada umumnya. Di antara kaum elit Mesir sendiri terdapat perselisihan yang tidak bisa dihindarkan. Partai Wafd sering berselisih paham dengan Raja Farouk, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan hajat orang banyak sering terbengkalai.⁸ Akan tetapi, apabila anggota Partai Wafd berselisih paham dengan Raja Farouk, Inggris seolah berusaha menjadi penengah. Melihat hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa Inggris masih memiliki andil yang kuat dalam pemerintahan Mesir.

Kemerdekaan Mesir tahun 1922 terwujud karena adanya kerjasama antara para pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja. Pada tahun 1923 Undang-Undang Dasar Mesir sebagai negara baru disahkan, namun Inggris masih mengawasi gerak dan perkembangan Mesir. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan Inggris masih menetapkan gubernurnya di Mesir.

⁸ M. Hamdan Basyar, *op.cit.*, hlm. 85.

Mesir diberikan kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan yang harus dijalani Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris menetapkan empat masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah (1) masalah Sudan, (2) keamanan Mesir dari intervensi asing, (3) pengawasan Terusan Suez, dan (4) penjaminan kepentingan asing dan minoritas.⁹ Pemerintahan Inggris tetap memiliki dominasi di Mesir tentu dengan alasan, bahwa Mesir dan Afrika Selatan merupakan pos terpenting untuk kerajaan Inggris.¹⁰ Mesir sebagai wilayah yang strategis banyak diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing baik dari Eropa maupun Asia. Wilayah Mesir pernah pula menjadi jajahan Turki.

Penguasaan Inggris atas wilayah Mesir dalam rangka menanamkan pertahanan kedua negara tersebut. Terutama pada saat Perang Dunia I berlangsung, Mesir dengan suka rela berkorban membantu Inggris. Kemudian pada tahun 1936 dibentuk pula aliansi Inggris Mesir dalam *military occupation* atas Terusan Suez selama 20 tahun.¹¹ Seiring berjalannya waktu, kedudukan Inggris semakin kuat di Mesir. Jajahan kekuasaan Inggris semakin terasa di seluruh sektor pertahanan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Aksan Andono, *Krisis di Timur Tengah (Mesir): Kumpulan Diskusi-Diskusi*. Yogyakarta: UGM Press, 1956, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*,

Mesir, antara lain pelabuhan, lapangan udara, dan instalasi penting. Pasukan Inggris menguasai seluruh daerah strategis di sepanjang Sungai Nil.¹² Adanya keterikatan Mesir dengan Inggris kian mengeras lantaran Mesir memutuskan hubungan dengan Jerman. Mesir dengan bersikeras menyatakan perang terhadap Jerman menyebabkan suasana semakin memanas pasca pecahnya Perang Dunia II.

Masyarakat Mesir hidup dalam sebuah tekanan yang menyebabkan ketidaknyamanan, meskipun hidup di tanah sendiri. Tekanan yang pertama justru berasal dari pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk, sedangkan yang kedua berasal dari pengaruh Inggris yang telah mengakar di Mesir. Masyarakat Mesir, terutama generasi muda mengalami keterbelakangan yang merupakan akibat dari tekanan tersebut. Keterbelakangan yang dialami oleh generasi muda Mesir menyebabkan mereka sulit memahami konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan Eropa modern. Bersamaan dengan solusi masalah tersebut, rektor Universitas Al-Azhar¹³ melalui pidatonya mengungkapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Mesir harus segera belajar mengenai batasan-batasan geografi dan poros nasionalisme. Nasionalisme datang ke Mesir bersama-sama

¹² Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *Anwar Sadat: Di Tengah Teror dan Damai*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1981, hlm. 7.

¹³ Universitas Al Azhar merupakan pusat pengkajian Islam tertua di dunia, masih memerankan peranan dalam mengembangkan kesjaranaan Islam dan memelihara warisan Islam. Keberadaan Universitas Al Azhar cukup diperhitungkan dalam dunia politik Mesir. Penguasa manapun yang hendak bertahan di Mesir harus selalu memperhitungkan Universitas Al Azhar. Lihat Rifyal Ka'bah, *Islam dan Serangan Pemikiran: Sebuah Gejala al-Ghazwul Fikri*. Jakarta: Granada Nadia, 1994, hlm. 41.

dengan peradaban baru dan membentuk dasar-dasar hubungan internal dan eksternal.

Di bawah Raja Fuad, Mesir mempunyai pemerintahan dan konstitusi yang tetap, akan tetapi hanya sebagai lambang dan boneka dari Inggris saja. Sampai ketika Raja Fuad meninggal dunia pada tanggal 28 April 1936, Mesir tampaknya belum adanya tanda-tanda merasakan kemerdekaan sepenuhnya.¹⁴ Sepeninggalan Raja Fuad, pemerintahan Mesir jatuh ke tangan Farouk yang pada waktu itu masih berumur 17 tahun. Raja Farouk dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1920. Raja Farouk menikah dengan seorang gadis cantik yang bernama Youssef Zufikar Pasha.¹⁵

Raja Farouk sangat pandai untuk menarik simpati rakyat Mesir. Raja Farouk selalu bersikap baik dan ramah kepada rakyatnya untuk memberikan kesan bahwa Raja Farouk adalah pemimpin yang bijaksana.

Raja begitu populer di mata masyarakat Mesir. Ia sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah di sepanjang Sungai Nil. Ia mengunjungi desa-desa dan masjid-masjid. Setiap hari Jum'at, Raja Farouk selalu mengerjakan Shalat Juma'at bersama rakyatnya. Setiap saat ia berpidato di radio milik pemerintahan dan seolah berbicara pada rakyatnya. Hal itu memberi kesan kepada rakyat Mesir bahwa Raja Farouk adalah seorang pemimpin yang baik. Juga seorang muslim yang baik. Apalagi tiap orang selalu melihat dimana-

¹⁴ Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁵ Tidak banyak buku yang menjelaskan mengenai istri Raja Farouk yang bernama Youssef Zufikar Pasha. Hanya dijelaskan bahwa ketika menikah, istri Raja Farouk tersebut berumur 17 tahun dan pernikahan Raja Farouk digelar dengan sangat megah, serta dihadiri oleh para negarawan besar. Raja Farouk memberi nama istrinya yang cantik tersebut dengan sebutan Farida yang memiliki arti "hanya satu". Lihat *Ibid.*, hlm. 6.

mana Raja Farouk tampil dengan tarbus (semacam topi gaya Turki) merahnya.¹⁶

Raja Farouk memerintah di Mesir dengan gelar Farouk I. Melihat sifat dan perilakunya yang baik dan peduli terhadap rakyatnya, Raja Farouk menerima banyak pujian dari masyarakat Mesir. Rakyat menyambut pemerintahan Raja Farouk dengan sorak-sorai. Hal ini dikarenakan rakyat sudah lemas dengan pemerintahan diktator Raja Fuad. Munculnya Raja Farouk di pemerintahan Mesir awalnya dianggap sebagai rahmat yang turun dari langit untuk menolong Mesir.¹⁷ Nama Raja Farouk kemudian menjadi sangat populer di masyarakat dan banyak dibangga-banggakan oleh rakyatnya.

Kepemimpinan Raja Farouk dalam pemerintahan Mesir awalnya banyak memperoleh dukungan dari generasi muda, yakni para mahasiswa yang bersekolah di Universitas Al Azhar. Para mahasiswa memberikan dukungan dan simpatinya kepada Raja Farouk. Hal tersebut terbukti dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang berlangsung satu hari sebelum Raja Farouk menikah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 1938, para mahasiswa melakukan demonstrasi di Kairo dengan meneriakkan yel-yel yang memuja Raja Farouk. Mereka mengungkapkan rasa kagum, simpati, dan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintahan Raja Farouk di Mesir.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Oemar Amin Hoesin, *op.cit.*, hlm. 39.

Memang, ada beberapa kalangan yang mendukung sepenuhnya kepemimpinan Raja Farouk di Mesir. Kalangan tersebut berasal dari masyarakat yang menginginkan perubahan pada pemerintahan Mesir, berbeda dengan masa pemerintahan Raja Fuad. Kepemimpinan Raja Farouk pada sekitar tahun 1936 sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai pihak. Partai Wafd yang merupakan salah satu partai memiliki banyak pendukung di Mesir sedikit menentang kepemimpinan Raja Farouk yang masih muda.

Partai Wafd pernah melakukan bentrok dengan istana dan Universitas Al-Azhar di bawah pimpinan Mustafa Nahas Pasha,¹⁸ bersikeras bahwa Raja Farouk tidak dapat melaksanakan kekuasaan penuh sebelum berumur dua puluh satu (yang baru akan dicapai tahun 1941), sedangkan raja mengklaim haknya ketika mencapai delapan belas tahun.¹⁹ Rektor Universitas Al-Azhar yang bernama Mustapha Al Maraghi, kemudian memberikan fatwa dan dukungan kepada Raja Farouk terkait dengan kekuasaannya sebagai pemimpin Mesir. Mustapha Al Maraghi merupakan musuh bebuyutan dari Partai Wafd.²⁰

¹⁸ Nahas Pasha adalah pemimpin Partai Wafd dan telah beberapa kali menjabat dalam kabinet pemerintahan di Mesir. Ia merupakan orang yang cukup berpengaruh dalam dunia politik Mesir, meski terkadang pendapatnya berlawanan dengan Raja Farouk, dan dianggap membahayakan posisi Raja Farouk di Mesir. Lihat Mohamed Moustofa Ata, hlm. 102-103.

¹⁹ Mohamed Heikal, *Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan*. Yogyakarta: Grafity Press, 1984, hlm. 13.

²⁰ Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *op.cit.*, hlm. 5.

Pada masa pemerintahan Raja Farouk, dikirimlah sebuah delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nahas Pasha ke Inggris dalam rangka musyawarah perjanjian keamanan bersama. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1936, empat bulan setelah Raja Farouk berkuasa di Mesir.²¹ Dengan dalih melaksanakan perjanjian tersebut, Inggris berhak menempatkan pasukan-pasukannya di wilayah Mesir. Hal tersebut terutama di sekitar wilayah Terusan Suez.

Penempatan kembali pasukan-pasukan Inggris di wilayah Mesir sama halnya dengan kembalinya penguasaan Inggris atas wilayah dan pemerintahan di Mesir. Ada berbagai kalangan yang menentang kebijakan yang diambil oleh Raja Farouk tersebut. Berbagai protes dan demonstrasi dilancarkan melalui media surat kabar, maupun televisi. Guna meredam demonstrasi tersebut, dilakukanlah penangkapan oleh sejumlah oknum dalam rangka mengurangi perlawanan. Meskipun demikian, Raja Farouk tetap bersikeras melanjutkan perjanjian bilateralnya dengan pemerintahan Inggris dalam rangka menjaga keamanan Mesir.

Pada tanggal 11 Juni 1940, ancaman Italia terhadap Mesir semakin meningkat. Pasukan-pasukan Italia sudah berjaga-jaga di berbagai sudut wilayah Mesir. Pemerintahan Inggris tetap tidak bergeming untuk memberikan bantuan dalam rangka menjaga stabilitas Mesir. Sejalan dengan semakin memanasnya keadaan di Mesir, terjadi persoalan politik dalam pemerintahan. Kabinet Ali Maher

²¹ *Ibid.*,

Pasha²² jatuh, dan Partai Wafd tidak dapat membentuk pemerintahan yang baru. Keadaan tersebut membuat Raja Farouk gelisah terkait dengan keberlangsungan pemerintahan Mesir. Kemudian tokoh politik yang setia terhadap Raja Farouk, Hussein Sirry Pasha²³ membentuk pemerintahan baru dengan mengumbar visi dan misinya untuk segera mengakhiri peperangan. Hussein Sirry Pasha berjanji akan segera mengadakan perombakan di berbagai bidang untuk memperbaiki keadaan.

Di dalam situasi seperti itu, muncul beberapa perpecahan di dalam masyarakat Mesir. Kelompok-kelompok tersebut muncul sesuai dengan idealisme mereka. Adapun kelompok tersebut ada yang mendukung Inggris, ada yang pro fasis (Italia dan Jerman), dan ada pula anti Inggris dan Italia. Gamal Abdul Nasser beserta rekan-rekannya inilah yang kemudian meletakkan pilihannya pada kelompok anti Inggris maupun Italia. Di bawah pemahaman yang sama, mereka kemudian menyatukan kekuatan untuk melawan pemerintahan yang pro Inggris.

²² Aly Maher Pasha merupakan Perdana Menteri Mesir, dan memiliki banyak peran dalam pemerintahan Mesir. Sekitar tahun 1952 ketika Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dilancarkan, ia memberikan nasehat kepada Raja Farouk supaya melakukan perombakan Undang-Undang Dasar. Ia juga turut melakukan pembersihan kabinet pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Lihat lampiran “Pemberontakan Militer di Mesir”, *Pewarta Soerabaia* (Kamis 24 Juli 1952), Surabaya: N.V. *Pewarta-Soerabaia*, hlm. 1.

²³ Husein Sirry Pasha membentuk kabinet baru pada awal bulan Juli 1952. Pada saat itu dunia politik Mesir dalam kondisi yang kritis. Husein Sirry Pasha ditunjuk oleh Raja Farouk untuk mengatasi kondisi tersebut dan mengembalikan keadaan menjadi lebih stabil. Namun, kabinet ini hanya berlangsung selama sekitar 3 minggu, setelah itu digantikan oleh Aly Maher Pasha. Lihat lampiran “Krisis Politik Mesir”, *Pewarta Soerabaia* (Edisi Kamis 3 Juli 1952), Surabaya: N.V. *Pewarta-Soerabaia*, hlm. 1. (bagian 1)

Mesir banyak mengalami pergolakan politik sebelum revolusi. Pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang. Tidak adanya pembatasan kekuasaan raja, membuat raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal tersebut yang membuat masyarakat Mesir tidak lagi memuji dan mengagumi sosok Raja Farouk. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan. Penyimpangan tersebut salah satunya ditandai dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh kalangan bangsawan, kriminalitas, dan ketidakadilan membuat kekecewaan dikalangan kelompok-kelompok masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Raja Farouk. Raja Farouk memiliki aset yang beragam, uang, dan lahan yang luas. Perlu diketahui, sebenarnya perilaku korupsi di Mesir mulai ada sejak penguasaan Muhammad Ali Pasha 1765. Sampai pada saat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dicetuskan, topik yang paling hangat dibicarakan adalah tentang korupsi.

C. Kondisi Sosial-Ekonomi

Secara historis, bangsa Mesir merupakan bangsa yang tidak suka dengan kekerasan.²⁴ Sejak abad ke 19, Bangsa Mesir lebih suka hidup dalam kedamaian tanpa adanya perselisihan antar kelompok. Bangsa Mesir dikatakan sebagai bangsa yang moderat, termasuk dalam menjalin hubungannya dengan Inggris. Adanya anggapan tersebut cukup masuk akal, mengingat pemerintahan Mesir

²⁴ Lillian Crag Harris, *Egypt: Internal Challenges and Regional Stability*. New York: Royal Institute of International Affairs, 1988, hlm. 8.

yang mempunyai sifat loyal dan tunduk kepada Inggris yang mempunyai kekuasaan atas semua yang ada di wilayah Mesir. Mulai dari sumber daya alam, potensi wilayah, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Mesir selama ini merupakan salah satu objek studi yang menarik, karena Mesir adalah negara Arab pertama di Timur Tengah yang terkena pengaruh langsung dari Eropa.²⁵ Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh budaya yang ditularkan oleh penjajahan Inggris di tanah Mesir sejak abad ke-19. Di sisi lain, dalam prestasi budaya dan intelektualnya, Mesir berada di barisan terdepan di antara negara-negara Arab. Salah satu bukti maju dan berkembangnya intelektual di Mesir adalah dengan berdirinya Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan dianggap sebagai universitas tertua di dunia.

Masyarakat Mesir merupakan bangsa keturunan Arab yang masih memiliki darah keturunan para nabi dan rasul. Secara historis, bangsa Mesir merupakan bangsa yang religius dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Adat istiadat Islam masih tertanam kuat dan menginternalisasi di dalam jiwa masyarakat Mesir. Hukum dan peraturan Islam juga masih banyak diterapkan dalam pemerintahan Mesir. Namun, setelah kedatangan bangsa Eropa (terutama Inggris) terjadi berbagai perubahan di Mesir.

²⁵ M. Yusron, "Orientalisme, Modernisasi, dan Ekonomi-Politik Tiga Pendekatan di Dalam Studi Sejarah Islam Mesir sebagai Kasus", *Al-Jami'ah: Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam No 38 Tahun 1989*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1989, hlm. 63.

Mesir sering dianggap sebagai garda depan perkembangan politik, sosial, intelektual, dan keagamaan di dunia Arab dan di dunia muslim yang lebih luas.²⁶ Selama lebih dari dua dasawarsa, penguasa Mesir telah bertarung menghadapi kebangkitan Islam yang menentang keras negara dan elit penguasa. Munculnya gerakan-gerakan Islam pembaharu di dunia berpedoman pula dengan gerakan-gerakan yang terdapat di Mesir. Tidak keliru apabila Mesir dianggap sebagai barometer gerakan pembaharu Islam di dunia.

Sejarah Mesir secara hakekat tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di dunia. Pengaruh Islam yang terdapat di Mesir dirasakan pula oleh negara-negara lain baik di wilayah Afrika maupun Asia. Ideologi Mesir berdasarkan atas doktrin Islam yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Pada awal pendudukan Turki/Ottoman, baik sistem kepercayaan maupun kondisi materialnya telah mengkristal dan hanya sedikit mengalami perubahan pada tiga abad berikutnya.²⁷

Pada abad ke-19 ketika Mesir jatuh dalam penguasaan Inggris mulai terjadi pergeseran-pergeseran baik dari segi kebudayaan dan menyangkut ritual keagamaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengaruh adanya modernisasi di negara Mesir hampir seluruhnya berasal dari penjajahan Inggris. Modernisasi itu sendiri

²⁶ John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 234.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

dicapai dengan pembangunan, atau pembangunan membawa modernisasi.²⁸ Masyarakat Mesir (terutama kelompok Ikhwanul Muslimin) merasa khawatir terhadap perkembangan Mesir akibat dominasi Inggris.

Pengaruh Barat kepada negara-negara Timur merupakan peristiwa yang terpenting dalam sejarah modern sejak permulaan abad ke-19. Bahkan pengaruh Yunani dan Romawi sudah ada sejak Mesir kuno. Pertikaian-pertikaian yang sering terjadi dalam lingkup sosial, ekonomi, agama, dan ilmu pengetahuan selalu tampak apabila masyarakat tua sebagai yang didapati di sana bertukar menjadi masyarakat modern.²⁹ Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir yang memiliki tingkat religius terhadap pemahaman Islam yang tinggi harus menghadapi masuknya pengaruh asing.

Masalah yang sulit dan berbelit-belit timbul karena masyarakat hendak menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru tersebut, tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Masyarakat seolah dipaksa untuk menerima pengaruh Inggris yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang selama ini dijunjung tinggi. Gaya hidup modern dan kebarat-baratan secara perlahan mempengaruhi generasi muda Mesir. Akibatnya timbullah kelompok-kelompok oposisi dalam masyarakat, terutama masyarakat Mesir yang menjunjung tinggi hukum dan nilai Islam. Salah

²⁸ Sidi Gazalba, *Modernisasi dalam Persoalan Bagaimana Sikap Islam?*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 52.

²⁹ Philip K Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Arab*. Yogyakarta: Iqra' Pustaka, 2001, hlm. 240.

satu kelompok oposisi yang menentang masuknya pengaruh kebudayaan asing tersebut adalah Ikhwanul Muslimin.

“Selama 150 tahun terakhir, Mesir telah sering berada di tepi kehancuran ekonomi. Meskipun keinginan untuk reformasi ekonomi memainkan peran utama dalam Revolusi Mesir 23 Juli 1952, sejak saat itu pemerintah tetap tidak dapat menetapkan program ekonomi yang jelas.... Pemerintah mulai dapat meningkatkan perekonomiannya dan memegang kendali pada sekitar pertengahan 1960-an, meliputi komunikasi keuangan, dan infrastruktur utilitas, serta sebagian besar industri manufaktur dan konstruksi, perdagangan luar negeri dan sistem transportasi.”³⁰

Adanya kemerosotan di berbagai bidang terkait dengan pemerintahan Raja Farouk di Mesir, menimbulkan oposisi di kalangan masyarakat. Muncul kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Raja Farouk, baik yang memiliki latar belakang agama maupun nasionalis. Kubu-kubu masyarakat anti pemerintahan Raja Farouk dan dominasi Inggris terus berkembang dan melaju untuk mencari dukungan dari masyarakat secara lebih luas. Pada mulanya mereka bergerak secara bebas tanpa mengenal misi dari masing-masing kelompok. Namun, pada akhirnya mereka menyatukan kekuatan di bawah tujuan yang sama, yakni menggulingkan kekuasaan Raja Farouk di Mesir.

Adanya pembaharuan di dalam masyarakat, dimana mulai ditinggalkannya adat yang berkaitan dengan Islam, semakin menambah suasana memanas.

³⁰ Terjemahan bebas dari “During the past 150 years, Egypt has frequently been on the edge of economic ruin. Although a desire for economic reform played a major role in the 1952 revolution, since then the government has remained unable to set a clear economic course... The government became increasingly involved in the economy, and by the mid-1960s had assumed control of the financial, communications, and utilities infrastructures, as well as of a large part of the manufacturing and construction industries, foreign trade and the transportation system.” Lihat Lillian Crag Harris, *op.cit.*, hlm. 8.

Muncullah kalangan-kalangan tertentu dengan tekad untuk melawan bentuk-bentuk sekular dalam pemerintahan. Perseteruan di antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pemerintahan Raja Farouk semakin gencar. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menentang dan merasa tidak senang dengan pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: Partai Wafd, Partai Sosialis Mesir, Ikhwanul Muslimin, dan Gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas). Pembentukan kelompok-kelompok tersebut bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Raja Farouk. Meskipun masing-masing kelompok dalam masyarakat memiliki misi, namun tujuan utama mereka sama yaitu ingin menggulingkan kekuasaan Raja Farouk yang sudah melampaui batas.

Secara umum, masyarakat Mesir sudah merasa muak dengan pejabat-pejabat pemerintahan yang pro dengan bangsa asing. Perang Dunia II juga memberikan dampak yang cukup berarti bagi Mesir. Salah satu dampak dari Perang Dunia II adalah mengibarkan nama Inggris di Mesir dan semakin memperparah keadaan Mesir. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Mesir. Harga jual kapas menurun, pendapatan per kapita merosot, dan kriminalitas merajalela.

....hampir separuh dari tanah pertanian di negara Mesir dikuasai oleh hanya sekitar 12.400 tuan tanah. Selebihnya 2.282.000 petani, menguasai sekitar sepertiganya saja. Kebanyakan menjadi buruh tani yang hidup ibarat budak. Sementara hanya sebagian kecil orang Mesir asli (pribumi Mesir) yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan menjadi kaum intelektual. Di

tahun 1936, pendapatan perkapita rata-rata hanya 50 dollar per tahun. Tingkat buta huruf mencapai 90%.³¹

Situasi kemerosotan sosial dan ekonomi di Mesir semakin diperparah dengan banyaknya pengangguran tenaga kerja produktif Mesir. Lapangan kerja yang terbatas, dan kaum imigram dari wilayah pedesaan yang berpindah ke Kairo tidak mendapatkan pekerjaan. Terjadinya ketimpangan sosial di Mesir bukan merupakan satu-satunya faktor kemerosotan bagi Mesir, namun keadaan tersebut menjadi semakin kacau mengingat Inggris masih melakukan kolonisasi terhadap Mesir.

Kondisi tersebut tentu mengundang perhatian masyarakat Mesir untuk segera berbenah diri. Sebelum adanya perebutan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Mesir merupakan sebuah negara yang bersifat semi feodal. Tuan tanah dan kerajaan merupakan pemilik lahan pertanian yang dominan di Mesir. Terdapat kesenjangan sosial yang tajam dalam masyarakat Mesir. Tuan tanah dan pengusaha kaya menikmati hidup dengan bergelimang harta, sementara petani miskin hanya memperoleh upah sedikit dari hasil jerih payah mereka.

Selama beberapa abad, kehidupan dan kesadaran politik para petani sangatlah rendahnya, kelas pekerja kota hampir tidak ada, kedudukan politik dan ekonomi kelas menengah yang kecil jumlahnya itu juga sangat menyedihkan, sementara sektor ekonomi modern yang kecil berada dalam tangan sekelompok kecil pengusaha kaya. Tuan tanah dan Raja Farouk merupakan pemilik yang paling besar di antara mereka, mendominasi ekonomi dan menguasai rezim. Sebanyak 11.000 tuan tanah memiliki 1/3 dari semua tanah yang dikelola. Sebagian besra penduduk hidup dalam taraf

³¹ Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *op.cit.*, hlm. 12.

penderitaan, baik sebagai petani yang mempunyai lahan sempit atau petani penggarap, karena $\frac{3}{4}$ dari pendapatan mereka digunakan untuk membayar sewa.³²

Dalam bidang pendidikan, juga terjadi pergeseran-pergeseran pada hakekat dan tujuan pendidikannya. Mesir yang sejak awal terkenal dengan peradabannya yang tinggi dan memiliki prestise yang mengagumkan di mata dunia, mulai kehilangan arah. Universitas Al-Azhar yang cukup diperhitungkan di dunia internasional (khususnya Islam) sedikit demi sedikit kehilangan pamornya. Para pemuda Mesir berada dalam kebodohan dan ketertinggalan zaman, meski mereka merupakan mahasiswa Al-Azhar.

Penyebab kemerosotan di dunia pendidikan Mesir justru merupakan akibat dari modernisasi yang ditanamkan oleh Inggris. Universitas Al-Azhar dianggap sangat kuno dan kolot, karena hanya menanamkan nilai-nilai Islam yang sudah tidak relevan bagi kehidupan modern. Universitas Al-Azhar dipandang sebagai benteng pertahanan paling konservatif Mesir dan cara berpikir kuno yang harus segera dibenahi. Selain itu, muncul *stigma* bahwa mahasiswa yang dididik di Al-Azhar akan menjadi orang terpencil dari dunia modern.³³ Akibatnya, penyesuaian diri setelah tamat terhadap kompleksitas kehidupan modern bagi mereka lebih sulit daripada pemuda-pemuda lainnya.

³² Eric A Nordlinger, *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 266-267.

³³ Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*. Surabaya: Usaha Nasional, 1965, hlm. 200.

Hampir di segala bidang kehidupan Mesir mengalami degradasi yang cukup signifikan. Keadaan *chaos* tersebut menimbulkan banyaknya kerusuhan dalam masyarakat Mesir yang berupa penjarahan, perampokan, dan perselisihan antar kelompok. Banyaknya tuntutan perubahan yang harus dilakukan oleh Mesir, membuat Gamal Abdul Nasser dan pengikutnya berpikir lebih dalam. Melalui kemampuannya, Gamal Abdul Nasser berusaha melakukan koordinasi dan menemukan jawaban atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Mesir secara hati-hati tanpa menyakiti pihak lain.³⁴

Sementara itu, gerakan anti Inggris terus berkembang pesat dan mengalami kemajuan. Gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok anti Inggris tersebut mulai tampak bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia II tahun 1939. Pada saat yang bersamaan, berkecamuk pula perang sebagai respon atas pendirian negara Israel di Palestina. Perang ini adalah awal perang Arab-Israel yang kemudian berlangsung selama beberapa tahun. Salah satu orang yang terjun dalam perang tersebut adalah Gamal Abdul Nasser, yang menjadi komandan satu unit militer di Palestina.

Masalah Palestina yang merupakan inti dan dasar sengketa Arab-Israel adalah sengketa atas Palestina antara penduduk Arab dan penduduk Yahudi-nya yang keduanya merasa berhak atas negeri itu dan berusaha untuk menguasainya

³⁴ Charles D Cremeans, *The Arabs and The World: Nasser's Arab Nationalist Policy*. New York: Council On Foreign Relations By Frederick A Preager, 1963, hlm. 29.

dan mengembangkan kehidupannya.³⁵ Penduduk Palestina berada di bawah tekanan bangsa Yahudi yang mendirikan negara di atas wilayah Palestina. Dalam upaya tersebut, para pemuda dari gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) membantu memberikan dukungan dan menempatkan kekuatan militernya di Palestina. Masalah yang terjadi di Palestina merupakan derita bagi bangsa Arab lainnya, termasuk Mesir.

Pergolakan yang terjadi di Palestina memang menjadi sorotan dunia waktu itu. Ada yang mendukung dominasi Timur Tengah di Palestina, ada pula yang mendukung bangsa Palestina sendiri untuk melepaskan belenggu Timur Tengah di wilayahnya. Pada tahun 1947, PBB memisahkan Palestina menjadi kawasan negara Israel dan kawasan Arab.³⁶ Mesir dan negara-negara Arab lainnya marah dan kemudian melancarkan serangan ke negara kecil tersebut. Disinilah peran Gamal Abdul Nasser terlihat sebagai komandan dari *Free Officers* (Perwira Bebas). Meski dengan senjata seadanya, pasukan *Free Officers* (Perwira Bebas) ikut andil dalam serangan ke negara Palestina atas penguasaan Israel.

Dalam Perang Palestina 1948 tersebut, pasukan Mesir memperoleh kegagalan. Tentara Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir yang terdiri dari berbagai gabungan. Dari pemerintah Mesir sendiri, hanya setengah hati memberikan dukungan terhadap upaya penyerbuan ke negara Palestina. Hal itu

³⁵ Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1977, hlm. 82.

³⁶ Jules Archer, *Kisah Para Diktator: Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran*. Tangerang: Narasi, 2007, hlm. 236.

dikarenakan kedudukan Inggris di Mesir masih dominan, dan penguasa Inggris sendiri kurang merasa yakin perlu dilakukannya penyerbuan ke Palestina.

Kegagalan yang dialami oleh Mesir dalam Perang Palestina 1948 dilansir oleh *Free Officers* (Perwira Bebas) karena raja dan pemerintah menghambat kinerja pasukan Mesir. Dalam perang tersebut, anggota bersenjata Mesir yang dikirim ke medan pertempuran merasa tidak puas. Transportasi dan pelayanan pengobatan kurang maksimal. Makanan dan sarana logistik lainnya pun tidak memadai. Dalam keadaan yang demikian, seharusnya Raja Farouk dan pemerintah memberikan perhatian khusus pada pasukan perang Mesir.

Betapapun Gamal Abdul Nasser tetap mengandalkan tertanamnya patriotisme yang kuat, namun ia juga amat berkeyakinan bahwa masalah-masalah yang dihadapi Mesir tidak dapat dipisahkan dari masalah dunia Arab secara keseluruhan. Pengalamannya sebagai perwira pejuang dalam Perang Palestina, meyakinkannya bahwa terdapat suatu keterkaitan yang erat antara konflik melawan Israel dengan perjuangan Arab untuk menyingkirkan segala bentuk dominasi asing. Kalaulah imperialisme merupakan masalah bersama, maka pembentukan negara Yahudi di tengah-tengah dunia Arab juga merupakan ancaman bersama.³⁷

Seperti yang dijelaskan dalam ungkapan di atas, terbentuknya negara Israel di Palestina seharusnya menjadi permasalahan yang serius bagi kesatuan negara Arab. Namun, menghadapi hal tersebut sepertinya kurang ada persiapan dan negara-negara Arab lainnya lebih suka memikirkan urusan negara masing-masing daripada membantu Palestina. Minimnya persatuan di antara negara-negara Arab

³⁷ Alan R Taylor, *The Arab Balance of Power*, Alih bahasa oleh Abubakar Basyarahil, *Pergeseran-pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*. Jakarta: Amar Press, 1990, hlm. 48.

membuat kemenangan bagi pasukan Israel. Kegagalan tersebut menumbuhkan kekhawatiran yang semakin luas terhadap masa depan Mesir di kalangan korps perwira. Keprihatinan yang ternyata mengawali terjadinya serangkaian perubahan-perubahan besar dalam kehidupan politik Mesir.³⁸

Kekalahan dalam Perang Palestina secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi kehidupan Mesir. Setelah Perang Palestina 1948 selesai, kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi Mesir mengalami kesemrawutan. Di bidang ekonomi, banyak perusahaan yang macet produksinya, dan harga barang konsumsi mengalami kenaikan beberapa kali lipat. Inflasi meledak tanpa bisa dihindari, sementara itu gaji pegawai tidak mengalami kenaikan yang berarti.³⁹ Keadaan ini menyebabkan kehidupan masyarakat Mesir semakin terpuruk. Populasi orang miskin menjadi bertambah banyak.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁹ M. Hamdan Basyar, *op.cit.*, hlm. 87.